



LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PEMETAAN DAN PENDATAAN KEMISKINAN

SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Disusun Oleh

NIKSON D.E.NOMLENI.S.SOS.MSI

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan

NDH : 23

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

ANGKATAN XVIII TAHUN 2020

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan proyek perubahan dan sebagai output bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arahan Mentor yaitu Sekretaris Daerah dan bimbingan Coach untuk menyelesaikan rancangan proyek perubahan Strategi Pemetaan Dan Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Laporan implementasi proyek perubahan menyajikan catatan dan bukti pelaksanaan sebagai output (keluaran) beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII telah mengaktualisasikan materi kepemimpinan strategis di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Pentingnya mengenali kondisi saat ini dan permasalahan utama, membuat peserta PKN perlu melakukan inovasi pelayanan terhadap organisasi bersama-sama dengan para staf dengan *stakeholders* atau lembaga lainnya. Permasalahan didiskusikan dan disepakati sebagai masalah bersama dalam proses *taking-ownership* pada tahap awal penyusunan proyek perubahan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara, para Widyaiswara dan pengelola pelatihan. Juga terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami haturkan kepada *Coach* Bapak Dr. Mudasir, M.Si dan kepada Mentor Bapak Marthen Selan, SH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan yang telah membimbing dalam memberikan arahan selama proses bimbingan.

Harapannya semoga proyek perubahan ini dapat diterapkan secara berkesinambungan dan dapat membantu masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya untuk Dinas Kependudukan yang melakukan perubahan sebagai organisasi adaptif. Mengingat proyek perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, mohon arahan dan masukan Evaluator atau Narasumber, Mentor dan *Coach* untuk perbaikan lebih lanjut.

Palembang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	7
Halaman Persetujuan	8
Abstrak	10
I. Judul	11
II. Deskripsi Proyek Perubahan.....	11
III. Latar Belakang	16
A. Kondisi Umum Organisasi	16
B. Kondisi Organisasi Saat Ini	20
C. Pentingnya Proyek Perubahan	23
IV. Tujuan dan Manfaat.....	24
A. Tujuan	24
B. Manfaat	26
V. Output dan Outcacome.....	28
A. Output.....	28
B. Outcome.....	29
VI. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATETGIS.....	29
A. Tahapan Perubahan / Rencana Strategis	30
B. Pentahapan (<i>Milestone</i>).....	31
1. <i>Milestones</i> Jangka Menengah.....	40
2. <i>Milestones</i> Jangka Pendek.....	41
VII. RENCANA STRATEGI MARKETING.....	27
A. Identifikasi stakeholders.....	37
B. Diagnosa Permasalahan Organisasi.....	39
C. Pendekatan Marketing Sektor Publik.....	32
D. Rencana Strategi Marketing	44

E. Rancangan Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran.....	46
VIII. KENDALA RESIKO	48
IX. MANAJEMEN PERUBAHAN	49
A. Capaian proyek perubahan.....	49
B. Bukti implementasi proyek perubahan.....	50
X. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	82
Daftar Pustaka	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2019- Maret 2020	14
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..	18
Tabel 4.1: Tujuan Perubahan.....	25
Tabel 5.1 : Output Proyek Perubahan	28
Tabel 6.1 : Tahapan Perubahan.....	30
Tabel 6.2 Milestones Jangka Jangka Panjang	33
Tabel 6.3 Milestones Jangka Menengah.....	33
Tabel 6.4 Milestones Jangka Pendek.....	34
Tabel 7.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	37
Tabel 7.2 Strategi Komunikasi.....	40
Tabel 7.3 : Identifikasi Permasalahan.....	43
Tabel 8.1 Kendala dan Resiko	48
Tabel 9.1 Desiminasi Output Proyek Perubahan.....	74

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PEMETAAN DAN PENDATAAN KEMISKINAN SEBAGAI
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Telah diseminarkan pada

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Oktober 2020
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui, Menyetujui
Pembimbing/Coach

Palembang, Oktober 2020
Peserta Diklat PKN Tk II

Dr. Mudasir, M.Si.
WIDYAISSWARA Ahli Utama

Nikson D.E. Nomleni.S.Sos, Msi
NIP 1973110419990301008

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PELAKSANAAN TAKING OWNERSHIP
(MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA)**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nomor Daftar Hadir | : 23 |
| 2. Nama Lengkap | : Nikson D.E. Nomleni.S.Sos,M.Si |
| 3. NIP | : 1973110419990301008 |
| 4. Unit Kerja | : Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| 5. Jabatan | : Kepala Dinas |
| 6. Identifikasi Masalah | : Pemetaan Kemiskinan |
| 7. Fokus Perubahan | : Penanggulangan Kemiskinan |
| 8. Sasaran Perubahan | : Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| 9. Area Perubahan | : Strategi Pemetaan, Pendataan kemiskinan sebagai upaya penanggulangan Kemiskinan |

Mengetahui, Menyetujui
Mentor

Palembang, November 2020
Peserta Diklat PKN Tk I

Marthen Selan, SH

Nikson D.E. Nomleni.S.Sos,M.Si
NIP. 1973110419990301008

PEMBIMBING/COACH

Dr. Mudasir, M.Si.
WIDYAISWARA Ahli Utama

ABSTRAK

Penulisan proyek perubahan ini bertujuan untuk Terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin, diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Penanganan Kemiskinan Berbasis Data merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut.

Data kemiskinan menjadi rujukan pengambil kebijakan dalam merumuskan program pembangunan yang intinya untuk menghapus kemiskinan di masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan DPRD sebagai unsur pengambil kebijakan pembangunan memerlukan data atau angka kemiskinan yang akurat dan terbaru dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan tahunan.

Dalam merumuskan program pembangunan untuk menghapus persoalan kemiskinan tersebut diperlukan data riil soal jumlah masyarakat yang benar-benar masih berstatus miskin dalam suatu wilayah. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah juga bisa dapat mengukur efektifitas dari program yang dilakukan OPD atau instansi dalam rangka menghapus persoalan kemiskinan tersebut, yang terjadi saat ini, sulit untuk dipastikan persentase capaian atau efektifitas dari pelaksanaan program dari suatu OPD dalam menurunkan angka kemiskinan. Ini merupakan salah satu akibat dari adanya data kemiskinan yang tidak realistis yang dipegang oleh OPD sebagai rujukan perumusan program.

Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat menjadi langkah Strategis dalam Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kata Kunci : Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

1. Judul :

STRATEGI PEMETAAN DAN PENDATAAN KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Disusun Oleh

NIKSON D E NOMLENI, S.SOS., MSI

II. Deskripsi Proyek Perubahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin aturan yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan kedua yaitu peningkatan pendapatan. Adanya undang-undang tersebut, Pemerintah perlu lebih ekstra mencari formula yang tepat agar negara bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang dibandingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia sangat beragam. Keragaman Indonesia itu kita mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri ada juga daerah agraris, namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan diatas, bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan ini.

Terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin, diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan

percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Penanganan Kemiskinan Berbasis Data merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut.

Data kemiskinan menjadi rujukan pengambil kebijakan dalam merumuskan program pembangunan yang intinya untuk menghapus kemiskinan di masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan DPRD sebagai unsur pengambil kebijakan pembangunan memerlukan data atau angka kemiskinan yang akurat dan terbaru dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan tahunan.

Dalam merumuskan program pembangunan untuk menghapus persoalan kemiskinan tersebut diperlukan data riil soal jumlah masyarakat yang benar-benar masih berstatus miskin dalam suatu wilayah. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah juga bisa dapat mengukur efektifitas dari program yang dilakukan OPD atau instansi dalam rangka menghapus persoalan kemiskinan tersebut.

Yang terjadi saat ini, sulit untuk dipastikan persentase capaian atau efektifitas dari pelaksanaan program dari suatu OPD dalam menurunkan angka kemiskinan. Ini merupakan salah satu akibat dari adanya data kemiskinan yang tidak realistis yang dipegang oleh OPD sebagai rujukan perumusan program.

Dikatakan data kemiskinan yang riil adalah persoalan penting yang perlu jadi perhatian Pemerintah daerah untuk digunakan oleh masing-masing OPD dalam merumuskan dan menjalankan perannya. Untuk itu seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat harus lebih diaktifkan untuk mendapatkan data kemiskinan di daerah yang akurat setiap tahunnya.

Data kemiskinan versi BPS yang selama ini dipakai pemerintah sebagai rujukan perumusan program perlu disandingkan juga dengan pendataan tahunan yang dilakukan TPKD. Disinilah perlu update data tahunan terkait kemiskinan itu sehingga program yang kita rumuskan benar-benar mengacu pada data yang lebih akurat dan capaian program OPD dalam menekan angka kemiskinan bisa terkontrol.

Saat ini Pemerintah Daerah TTS tengah dalam proses perumusan program pembangunan untuk tahun 2020 yang didasarkan pada hasil musyawarah dari tingkat desa/kelurahan. Persoalan penting yang dihadapi PemdaTTS saat ini adalah angka kemiskinan yang masih tinggi. Upaya mengatasi persoalan tersebut adalah melalui perumusan program kegiatan pembangunan yang dibahas bersama DPRD.

Persentase penduduk miskin pada Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Maret 2020 sebesar 20,90 persen meningkat 0,28 persen poin terhadap September 2019 dan menurun 0,19persen poin terhadap Maret 2019. Dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 1.153,76 ribu orang meningkat 24,3 ribu orang terhadap September 2019 dan meningkat 7,44ribu orang terhadap Maret 2019.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019sebesar 8,34 persen, naik menjadi 8,64 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019sebesar 24,45 persen, naik menjadi 24,73 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 didaerah perkotaan naik sekitar 4,8 ribu orang (dari 108,62 ribu orang padaSeptember 2019 menjadi 113,39 ribu orang pada Maret 2020). Sementaraitu daerah perdesaan naik sekitar 19,5 ribu orang (dari 1.020,84 ribu orangpada September 2019 menjadi 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020).

Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp403.005,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp316.130,-/kapita/bulan (78,44 persen) dan garis kemiskinan bukanmakanan sebesar Rp86.875,-/kapita/bulan (21,56 persen). Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada Maret 2020 memiliki 5,82 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnyagaris kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.345.489,-/rumah tangga miskin/bulan.

Secara umum, pada periode Maret 2009 – September 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi NTT cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, namun pada Maret 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu meningkat 3,01 persen poin terhadap September 2014. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2020 mencapai 1.153,76 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 20,90 persen, meningkat 0,28 persen poin terhadap September 2019 dan menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019.

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2019-Maret 2020**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2019	114,12	8,84
September 2019	108,62	8,34
Maret 2020	113,39	8,64
Perdesaan		
Maret 2019	1 032,20	24,91
September 2019	1 020,84	24,45
Maret 2020	1 040,37	24,73
Total		
Maret 2019	1 146,32	21,09
September 2019	1 129,46	20,62
Maret 2020	1 153,76	20,90

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, September 2019, dan Maret 2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan (2)	Bukan Makanan (3)	Total (4)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2019	317 432	124 193	441 625
September 2019	337 056	130 258	467 314
Maret 2020	357 134	137 255	494 388
Perubahan Mar'19 – Mar'20 (%)	12,51	10,52	11,95
Perubahan Sept'19 – Mar'20 (%)	5,96	5,37	5,79
Perdesaan			
Maret 2019	285 352	68 332	353 684
September 2019	289 037	69 974	359 011
Maret 2020	305 029	71 183	376 212
Perubahan Mar'19 – Mar'20 (%)	6,90	4,17	6,37
Perubahan Sept'19 – Mar'20 (%)	5,53	1,73	4,79
Total			
Maret 2019	292 305	81 617	373 922
September 2019	299 476	84 286	383 762
Maret 2020	316 130	86 875	403 005
Perubahan Mar'19 – Mar'20 (%)	8,15	6,44	7,78
Perubahan Sept'19 – Mar'20 (%)	5,56	3,07	5,01

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, September 2019, dan Maret 2020

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan masing-masing naik sebesar 4,8 ribu orang dan 19,5 ribu orang. Begitu pun dengan tingkat kemiskinan, mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di perkotaan naik dari 8,34 persen menjadi 8,64 persen dan tingkat kemiskinan di perdesaan naik dari 24,45 persen menjadi 24,73 persen.

Mentor : **Marthen Selan,SH.**
: **(Sekretaris Daerah Timor Tengah Selatan)**

Peserta Pelatihan : **Nikson D.E.Nomleni.S.Sos, M.Si.**

Coach : **Dr. Mudasir**
(Widyaiswara Ahli Utama)

III. LATAR BELAKANG

A. Kondisi Umum Organisasi atau Satuan Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang secara organisasi mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang sosial serta Tugas Pembantuan yang diberikan.

Fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2016 yaitu :

- A Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
- B Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
- C Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
- D Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis Bidang Sosial;
- E Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hendak dicapai pada tahun 2019 - 2024 adalah :

“Mewujudkan Timor Tengah Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera.”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif dan Efisien serta Bebas dari KKN Melalui Reformasi Birokrasi;

2. Mempercepat Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kebutuhan Dasar (Jalan, Jembatan, Perumahan, Listrik, Air Bersih dan Irigasi);
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas);
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Pertanian, Peternakan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan).

Berdasarkan pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten TTS diatas, maka Misi yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan TUPOKSI Dinas Sosial Kabupaten TTS adalah Misi Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten TTS mengimplementasikannya dalam bentuk Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, yakni :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya,** dengan fokus kegiatan : (1) peningkatan kemampuan pendamping PMKS; (2) pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin; (3) monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu ; (4) peningkatan sinergitas program keluarga harapan dan (5) memfasilitasi anak terlantar dan anak jalanan.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,** dengan fokus kegiatan : (1) peningkatan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pembinaan para cacat dan eks trauma; (2) peningkatan ketrampilan berusaha bagi penyakit kronis dan eks kusta; (3) perlindungan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan.
- 3) Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial dan Traumatik,** dengan fokus kegiatan : (1) pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial; (2) penanganan deportan dan anak/orang terlantar.
- 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,** dengan fokus kegiatan : (1) peningkatan kualitas SDM kemasyarakatan bidang Kesejahteraan Sosial; (2) pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; (3) peningkatan kapasitas dan peran Taruna Siaga Bencana.
- 5) Program Bantuan Sosial kepada Individu dan Keluarga,** dengan fokus kegiatan: (1) bantuan jaminan hidup bagi perintis kemerdekaan; (2) bantuan

kepada Yayasan yang menangani pelayanan sosial dan (3) bantuan alat bantu bagi penyandang cacat.

Adapun faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dapat dijabarkan dalam Tabel 3.2 berikut dibawah ini.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
VISI : “Mewujudkan Timor Tengah Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera” MISI : 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif dan Efisien serta Bebas dari KKN Melalui Reformasi Birokrasi; 2. Mempercepat Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kebutuhan Dasar (Jalan, Jembatan, Perumahan, Listrik, Air Bersih dan Irigasi); 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas); 4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Pertanian, Peternakan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan).			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Terbatasnya jumlah layanan terhadap Keluarga Fakir Miskin	Tingginya jumlah Keluarga Fakir Miskin	Adanya dukungan dari pemerintah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Terbatasnya layanan bagi Lanjut Usia luar panti 2. Terbatasnya pelayanan traumatik bagi masyarakat yg mengalami guncangan	Minimnya Ketersediaan Pekerja Sosial Profesional	1. Tersedianya PSKS 2. Adanya regulasi tentang Pekerja Sosial Profesional
Program pembinaan anak terlantar (ANTAR)	Tingginya jumlah Keterlantaran Anak	1. Terbatasnya Sumber Daya	Tersedianya PSKS

		Manusia yang ada 2. Belum adanya Rumah Singgah bagi anak 3. Belum adanya aksesibilitas bagi Anak Disabilitas	
Program pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma	1. Belum Optimalnya Pelayanan terhadap ODK 2. Belum tersedianya aksesibilitas bagi ODK pada tempat pelayanan umum	Sifat tertutup keluarga Orang Dengan Kedisabilitas (ODK)	Ketersediaan dana dan dukungan pemerintah
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Sulitnya untuk mendapatkan data akurat PMKS Tuna Sosial	Pemerintah desa maupun masyarakat tidak memiliki/menutupi data PMKSTuna Sosial	Tersedianya PSKS
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Minimnya Ketersediaan Alokasi Anggaran Insentif bagi PSKS	Insentif yang minim dan belum sebanding dengan tugas yang diemban oleh PSKS	Jiwa Relawan /sosial/filantropi dari PSKS

Merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

- a. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional,
- b. Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi,
- c. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan.

B. Kondisi organisasi saat ini

Pada akhir tahun 2017, inisiatif pengetasan kemiskinan baru yang disebutnya sebagai DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS). DTKS adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 24 juta rumahtangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

Selain digunakan untuk melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat atau daerah, data ini juga digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial.

Sebagai contoh, sejak tahun 2012 DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.



Walau terdengar sangat menjanjikan karena dianggap mampu menjawab permasalahan tentang distribusi bantuan yang efektif karena keberadaan data yang teruji, DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) tidak berarti bebas dari permasalahan. Setidaknya, terdapat dua masalah mendasar yang dapat diperiksa dari DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) itu sendiri, yaitu masalah bisa pengetahuan tentang kemiskinan dan solusinya serta masalah implementasi.

Sama halnya yang ditemui pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, diperlukannya strategi penanggulangan kemiskinan secara massif dengan DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL . Masalah pengetahuan tentang kemiskinan terkait dengan penggunaan asumsi kemiskinan sebagai masalah dalam individual rumah tangga. Sementara masalah implementasi terkait pada bagaimana metode penyaluran bantuan sebagaimana yang ditetapkan DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) dapat dilakukan secara baik.

Sebagaimana terlihat dari namanya, DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) bukanlah sebuah inisiatif kebijakan sosial yang bersifat langsung untuk mengentaskan kemiskinan. DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang lebih umum dimana tujuan utamanya adalah mendukung setiap kebijakan perlindungan sosial yang ada melalui penyediaan data yang baik.

Gagasan ini sendiri berangkat dari pendekatan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Pemerintah beranggapan bahwasanya masih terdapatnya masalah dalam pengentasan kemiskinan adalah terkait dengan keberadaan data yang buruk serta tidak akurat. Sebagai hulu dari sistem kebijakan pengentasan kemiskinan, penyediaan data yang buruk tentu akan berdampak terhadap hilir atau capaian dari kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketersediaan data yang baik harus terpenuhi. Cara pandang kemiskinan dapat diatasi dengan data itu sendiri berangkat dari suatu asumsi tertentu tentang kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya di luar dari proses pembangunan ekonomi yang ada. Dalam pandangan ini, sistem ekonomi yang berlaku sudah selalu dianggap baik.

Masalahnya kemudian dalam sistem ekonomi yang berlaku, terdapat suatu kelompok sosial yang mana mereka tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Kelompok sosial inilah yang kemudian dinilai sebagai kelompok masyarakat miskin. Semenjak kelompok miskin ini dianggap berada di luar dari sistem ekonomi, maka analisa atas penyebab kemiskinan mereka akan selalu dihubungkan secara individual; mereka adalah kelompok sosial yang secara individual (baik individual secara perorangan maupun keluarga) tidak masuk dalam kategori kelompok masyarakat lain yang mendapatkan manfaat dari pembangunan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan selanjutnya, pemerintah harus menyelenggarakan kebijakan sosial yang mampu memastikan bahwa kelompok miskin tersebut bisa masuk dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang ada.

Dalam gagasan inilah project leader selaku Kepala Dinas Sosial menemukan adanya satu pendekatan kebijakan sosial yang dikenal sebagai kebijakan pengentasan kemiskinan tersasar (targeted). Dalam kebijakan ini, pemerintah hanya akan memberikan bantuan kepada mereka yang dianggap berada diluar dari pembangunan. Pemerintah kemudian harus melakukan alokasi anggaran yang khusus untuk mensasar kelompok sosial miskin. Alokasi anggaran khusus untuk kelompok miskin inilah yang kemudian menjadi anggaran utama untuk mengatasi kemiskinan dalam sistem pembangunan yang ada yang telah ditetapkan.

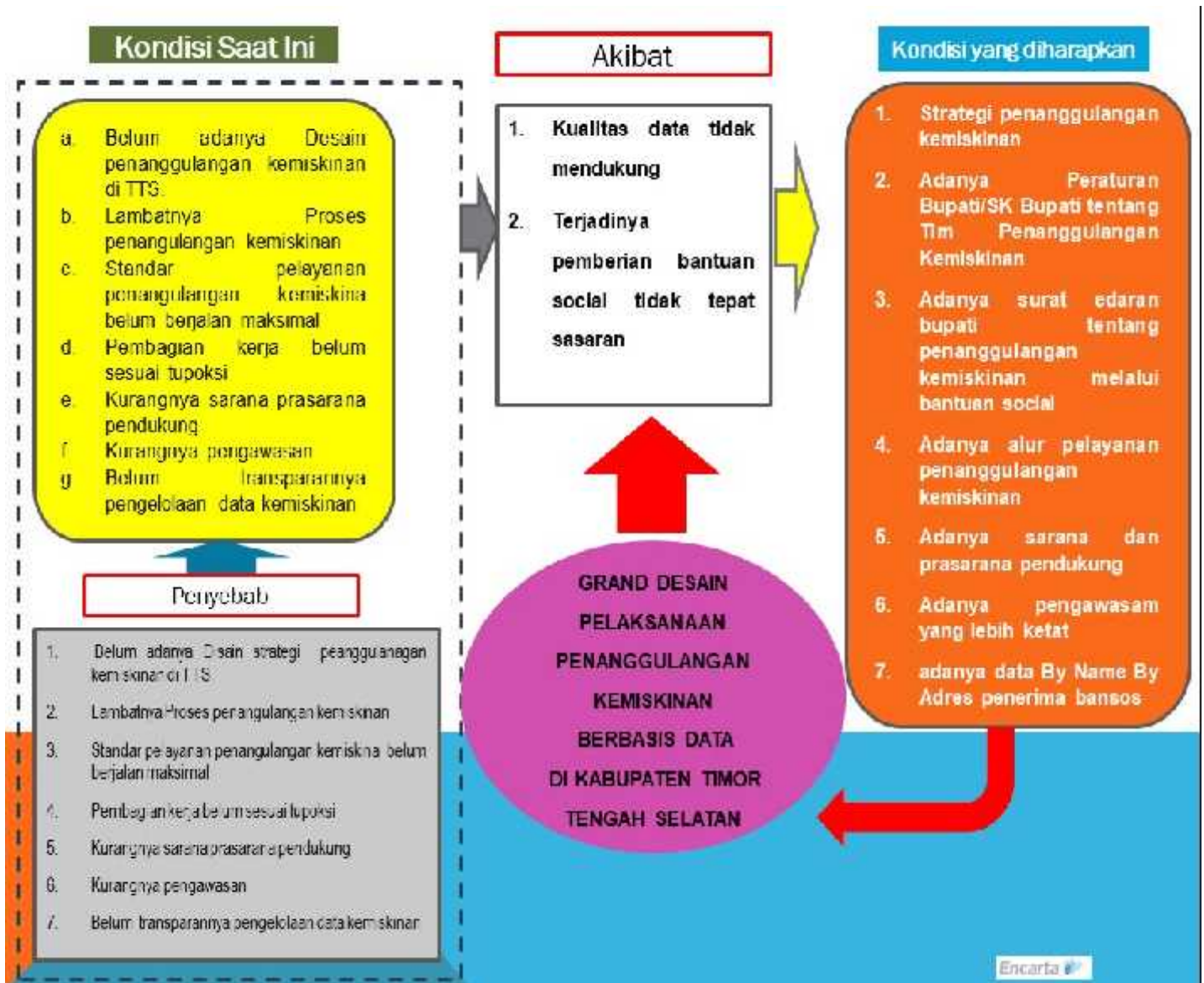
Dalam gagasan inilah project leader selaku Kepala Dinas Sosial menemukan adanya satu pendekatan kebijakan sosial yang dikenal sebagai kebijakan pengentasan kemiskinan tersasar (targeted).

Dalam kebijakan ini, pemerintah hanya akan memberikan bantuan kepada mereka yang dianggap berada diluar dari pembangunan. Pemerintah kemudian harus melakukan alokasi anggaran yang khusus untuk mensasar kelompok sosial miskin. Alokasi anggaran khusus untuk kelompok miskin inilah yang kemudian menjadi anggaran utama untuk mengatasi kemiskinan dalam sistem pembangunan yang ada yang telah ditetapkan. Terkait dengan solusi maksimal, harus diupayakan mengubah cara pandang serta metode penyelenggaraan perlindungan sosial itu sendiri. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang sifatnya berada diluar pembangunan, tapi ia adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Akarnya dapat dirujuk pada

keberadaan dominan kelompok kekuasaan tertentu (elit) yang mendominasi proses pembangunan yang dengannya membuat banyak kelompok sosial yang dieksploitasi dan dipinggirkan dari pembangunan.

C. Penting Proyek Perubahan

Berdasarkan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh di bandingkan dengan kondisi riil yang ada saat ini maka dilakukan analisis kesenjangan sebagai berikut:



IV. TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF

A. Tujuan

Tujuan Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan bagi menjadi 3 bagian, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tabel 4.1: Tujuan Perubahan

No.	Jangka Waktu	Tujuan Perubahan
1.	Jangka Panjang (1 Tahun)	a. Merealisasikan pemetaan dan pendataan penanggulangan kemiskinan sesuai prosedur dan mekanisme kepada OPD terkait. b. Terwujudnya Visi dan Misi Bupati Timor Tengah Selatan Provinsi NTT
2.	Jangka Menengah (6 Bulan)	a. Membuat Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan berbasis data b. Sosialisasi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui berbasis data c. Digitalisasi integrasi Data Penyaluran Bansos secara Realtime. d. Tersedianya SOP pelaksanaan Grand Desain Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

3.	Jangka Pendek	Menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan pelaksanaan program Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa tujuan yang lebih spesifik adalah: - Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder internal dan eksternal terkait penanggulangan kemiskinan melalui berbasis data di Kabupaten Timor Tengah Selatan - Menginventarisir data yang telah tervalidasi penerima bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan - Menyiapkan Petugas khusus Verifikasi dan Validasi Data secara Kontinue.
----	---------------	---

B. Manfaat

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari dilaksanakan program Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi:

- Data yang tepat sasaran. Proyek perubahan ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat atau Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- Terjalinnnya sinergitas antara Kementerian/Lembaga dalam pengentasan kemiskinan;

- Membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial.
- Memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

2. Bagi Masyarakat Miskin:

- Bantuan Sampai Tepat Sasaran
- Jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program.

V. OUTPUT DAN OUTCOME

A. Output

Output yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Output Proyek Perubahan

No.	Jangka Waktu	Tujuan Perubahan
1.	Jangka Panjang (2 Tahun)	a. Merealisasikan pemetaan dan pendataan penanggulangan kemiskinan sesuai prosedur dan mekanisme kepada OPD terkait. b. Terwujudnya Visi dan Misi Bupati Timor Tengah Selatan Provinsi NTT
2.	Jangka Menengah (6 Bulan)	a. Membuat Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan berbasis data b. Sosialisasi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui berbasis data c. Digitalisasi integrasi Data Penyaluran Bansos secara Realtime. d. Tersedianya SOP pelaksanaan Grand Desain Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

3.	Jangka Pendek	Menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan pelaksanaan program Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa tujuan yang lebih spesifik adalah: a. Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder internal dan eksternal terkait penanggulangan kemiskinan melalui berbasis data di Kabupaten Timor Tengah Selatan b. Menginventarisir data yang telah tervalidasi penerima bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan c. Menyiapkan Petugas khusus Verifikasi dan Validasi Data secara Kontinue.
----	---------------	--

B. Outcome

Outcome dari Proyek Perubahan program Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan akan mewujudkan:

- Tercapainya Data yang Valid dan Update sehingga Pemberian bantuan tepat Sasaran.
- Terciptanya Penurunan angka Kemiskinan di bawah 1 (Satu) Digit tahun 2023.
- Tersedianya Inventarisasi raport si miskin yang belum terdata di Basis data Dinas Sosial.

VI. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

A. Tahapan Perubahan / Rencana Strategis

Output dari rencana strategis yang dikembangkan sebagai berikut :

Tabel 6.1 : Tahapan Perubahan

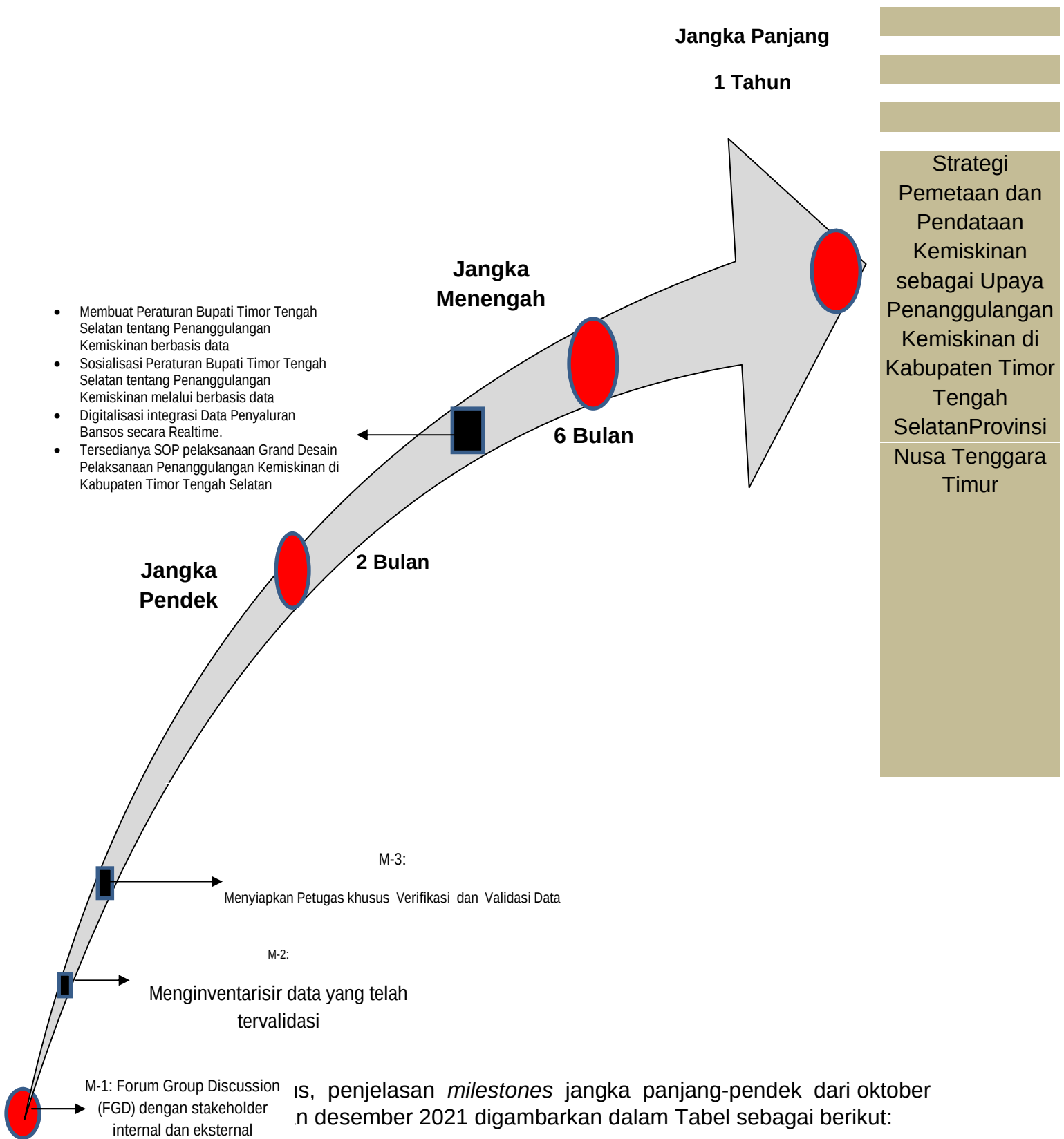
No.	Jangka Waktu	Tujuan Perubahan
1.	Jangka Panjang (3 Tahun)	1. Merealisasikan disain peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai prosedur dan mekanisme kepada OPD terkait. 2. Terwujudnya Visi dan Misi Bupati Timor Tengah Selatan Provinsi NTT
2.	Jangka Menengah (6 Bulan)	1. Membuat Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan berbasis data 2. Sosialisasi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui berbasis data 3. Digitalisasi integrasi Data Penyaluran Bansos secara Realtime. 4. Tersedianya SOP pelaksanaan Grand Desain Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

3.	Jangka Pendek	Menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan pelaksanaan program Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa tujuan yang lebih spesifik adalah: 1. Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder internal dan eksternal terkait penanggulangan kemiskinan melalui berbasis data di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2. Menginventarisir data yang telah tervalidasi penerima bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan 3. Menyiapkan Petugas khusus Verifikasi dan Validasi Data secara Kontinue.
----	---------------	--

B. Pentahapan (*Milestones*)

Tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Milestone Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tahapan *milestones* untuk Jangka Panjang Sampai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2: Milestones Jangka Panjang

TAHAPAN UTAMA	PROSES KEGIATAN	Waktu	OUTPUT
Merealisasikan desain peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai prosedur dan mekanisme kepada OPD terkait.		2022	
Terwujudnya Visi dan Misi Bupati Timor Tengah Selatan Provinsi NTT			

2. Tahapan *milestones* untuk Jangka Menengah (6 Bulan) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3: Milestones Jangka Menengah

TAHAPAN UTAMA	PROSES KEGIATAN	Waktu	OUTPUT
a. Membuat Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan berbasis data	- Merancang Surat edaran Bupati Timor Tengah Selatan - Berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait Surat edaran Bupati	6 Bulan	- Surat edaran Bupati - Nota dinas ke Biro Hukum
b. Sosialisasi Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penanggulangan	- Melakukan acara sosialisasi - Penyebaran informasi		- Dokumen Hasil sosialisasi - Undangan peserta

TAHAPAN UTAMA	PROSES KEGIATAN	Waktu	OUTPUT
Kemiskinan melalui berbasis data	melalui Website, Medsos lainnya 3. Menyebarkan undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi		• Photo kegiatan • Absensi sosialisasi
c. Digitalisasi integrasi Data Penyaluran Bansos secara Realtime.	• Menginventarisir data penerima bantuan sosial	6 Bulan	• Photo • Hasil kajian
d. Tersedianya SOP pelaksanaan Grand Desain Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	• Menyusun SOP • Menyelenggarakan <i>focus group discussion</i> (FGD) dengan perwakilan stakeholder yang terkait. • Melaksanakan FGD dengan tim ahli instansi terkait untuk menyusun SOP		• Dokumen SOP • Notulensi dan foto FGD penyusunan SOP.

Tabel 6.4 : Milestones Jangka Pendek (oktober s.d desember 2020)

TAHAPAN UTAMA	PROSES KEGIATAN	Waktu	OUTPUT
1. <i>Milestones 1</i> Perencanaan	1. Menyiapkan tim melaksanakan proyek perubahan. 2. Menyusun rencana detail proyek perubahan jangka pendek.	14 September 2020	• Surat Keputusan (SK) Tim • Dokumen rencana kegiatan
2. <i>Milestones 2</i> : Menyiapkan Tim Internal menginput data	1. Menetapkan pedoman penginputan data 2. Surat Tugas Dinas terkait penginputan data	15 September 2020	• Dokumen pedoman penginputan data • Surat dinas • Photo

			• Tanda terima surat • Lembar disposisi
3. <i>Milestones 3 :</i> Forum Group Discussion terkait Penanganan Kemiskinan Berbasis Data	1. Menyelenggarakan <i>focus group discussion</i> (FGD) dengan perwakilan stakeholder yang terkait. 2. Melaksanakan FGD dengan tim ahli instansi terkait untuk menyusun pedoman basis data	15 Sept 2020	• Undangan FGD • Photo kegiatan • Hasil kajian • absensi
4. <i>Milestones 4:</i> Menginventarisir data yang telah tervalidasi penerima bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	Mempersiapkan inventarisir data valid penerima bantuan sosial	21-27 September 2020	• Inventarisasi tools • Undangan rapat musyawarah • Photo kegiatan
5. <i>Milestone 5:</i> Melaksanakan Pelatihan bagi Petugas Khusus Verifikasi dan Validasi	Pelatihan dilaksanakan pada aula Dinas Sosial.	12 Oktober s/d 3 November 2020	1. Undangan. 2. Daftar hadir. • Dokumentasi
6. <i>Milestone 6:</i> a. Proses Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan. b. Proses Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan	a. Pengajuan Dokumen Perbub Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. b. Dokumen Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan telah dittd.	a. 4 Nov s/d 6 2020 b. 7 s/d 10 Nov	a. Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan. b. Dokumen Peraturan Bupati tentang Penanggulan

Kemiskinan.		2020	gan Kemiskinan Dokumentasi
7. <i>Milestone 7:</i> Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan kepada stakeholder eksternal (seluruh Pimpinan OPD, Kecamatan Kota SoE dan Kecamatan Amanuban Barat).	Terwujudnya pemahaman bersama tentang upaya penanggulangan kemiskinan.	11 s/d 13 November 2020	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulanga n Kemiskinan. Undangan. Notulen Rapat. Dokumentasi.

VII. RENCANA STRATEGI MARKETING

A. Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi / proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh reformer. *Stakeholders* yang akan terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Tabel berikut menjelaskan jenis stakeholder:

Tabel 7.1
Identifikasi Pemangku Kepentingan

Struktur	Deskripsi
	Atasan Mentor : EGUSEM PIETER TAHUN, ST, MM Jabatan : Bupati TTS Mentor : Marthen Selan,SH. Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan Coach : Dr. H. Mudasir, M.Pd. Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama Project Leader : Nikson D.E. Nomleni. S.Sos, M.Si. Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kab. Timor Tengah Selatan Tim Internal : 1. Bupati 2. Sekda 3. Kabid 4. Kasubbag/Kasi 5. Seluruh Staf di Dinsos Tim Eksternal : 1. Seluruh OPD terkait 2. BPS 3. BPJS 4. Media Massa 5. LSM 6. Masyarakat

Setelah mengidentifikasi stakeholder yang mempengaruhi proyek perubahan ini, selanjutnya peserta melakukan analisis terhadap pengaruh stakeholder untuk tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini. Analisis stakeholder menggunakan analisis tingkat pengaruh (*Influence/power*), dan tingkat minat (*interest*) stakeholder tersebut terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Adapun hasil tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Analisis Peta Stakeholders

<u>Stakeholder Defender</u> Stakeholder Defender yang memiliki kepentingan terhadap perubahan akan tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan ini antara lain: 1. Bappeda 2. Dinkes 3. Dukcapil 4. BPKAD 5. Camat 6. Lurah 7. Kades 8. BPS 9. BPJS	<u>Stakeholder Promotor</u> Stakeholder promotor yang sangat berpengaruh dan berkepentingan terhadap proyek perubahan antara lain: 1. Bupati 2. Sekda 3. Kabid/ 4. Kasubbag/Kasi 5. Seluruh Staf di Dinas Sosial 6. Seluruh OPD
<u>Stakeholder Apathetics</u> Stakeholder Apathetics adalah stakeholder yang kurang memiliki kepentingan dan bahkan tidak mengetahui adanya dengan proyek perubahan ini antara lain: 1. Media Massa 2. LSM 3. Masyarakat	<u>Stakeholder Latents</u> Stakeholder Latents adalah stakeholder yang tidak mempunyai kepentingan khusus namun mempunyai pengaruh yang besar terjadinya keberhasilan proyek perubahan ini antara lain : 1. Bappeda 2. Bagian Hukum 3. Disdukcapil

Hasil analisis pengelompokan stakeholder menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok stakeholder yaitu:

1. **Promoters** adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan minat tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
 - Bupati
 - Sekda
 - Kabid/
 - Kasubbag/Kasi
 - Seluruh Staf di Dinas Sosial
2. **Latent** adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar, tetapi memiliki minat yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
 - Bappeda
 - Disdukcapil
 - Bagian Hukum
3. **Defenders** adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil, tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
 - Bappeda
 - Dinkes
 - Dukcapil
 - BPKAD
 - Camat
 - Lurah
 - Kades
 - BPS
 - BPJS
4. **Apathetics** adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan minat rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
 - Media Massa

Untuk menghadapi setiap jenis stakeholder di atas, peserta pelatihan akan menggunakan strategi komunikasi sebagai berikut:

Tabel 7.2: Strategi Komunikasi

KELOMPOK STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors	Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap Proyek perubahan ini (<i>closely managed strategy</i>), diantaranya: • Konsultasi secara reguler • Pelaporan secara reguler • Diskusi secara reguler
Latens	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek perubahan yaitu dengan: • Sosialisasi • Edukasi • Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi promotors
Defenders	Strategi komunikasi yang digunakan adalah Untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar mendukung Proyek perubahan yaitu dengan: • Sosialisasi dan penjelasan yang reguler (<i>keep informed</i>)
Apathetics	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders ini agar mendukung Proyek perubahan yaitu dengan: • Sosialisasi dan advokasi

2. Diagnosa Permasalahan Organisasi:

Untuk mendiagnosa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil diagnosa tersebut sebagai berikut:

- a. Mengacu pada hasil diagnose permasalahan tersebut, kemudian dilakukan diskusi secara mendalam (*focus group discussion/FGD*) dengan melibatkan Stakeholder Internal dan Eksternal, maka permasalahan yang dianggap paling strategis dan nantinya diharapkan mampu memberikan dampak keberlanjutan

dan memberikan manfaat pada organisasi, yaitu “Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

b. Untuk memspesifikasikan dari isu strategis tersebut, kemudian dibahas lagi agar isu strategisnya lebih fokus dan mengarah pada pemantapan Penanganan Kemiskinan Berbasis Data dari level, bupati/Walikota dan Gubernur. Adapun alasan dipilihnya isu strategis tersebut, yaitu:

- Saat ini terlalu banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang menangani urusan kasus penanganan kemiskinan;
- Proses pengajuan penanganan kemiskinan DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL dan penggunaannya belum dipahami secara general yang kasusnya semakin bertambah.

1. Komunikasi dengan *Stakeholders*

Selanjutnya, isu strategis yang berdampak luas dan sistemik tersebut kemudian dikomunikasikan kembali dengan *stakeholders* internal dan eksternal yaitu BPKAD, Bagian Hukum, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin. Bentuk komunikasi yang dipandang paling tepat, yaitu dengan mengadakan serial pertemuan guna menyusun kesepakatan antar lembaga, yang mana butir-butir kesepakatan tersebut, diantaranya terdiri dari:

- a. Komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan secara aktif mengambil peran dan tanggung jawab dalam upaya menguatkan penggunaan dana bantuan masyarakat miskin, sesuai dengan peran dan posisi tupoksi.
- b. Meningkatkan integritas pembangunan dengan mengutamakan Asas penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. dan jauh dari perilaku mendahulukan kepentingan kelompok/golongan/ego sektor;
- c. Menyusun rencana aksi pembangunan transparan untuk sosialisasi dan penguatan nilai-nilai kejujuran dan transparansi serta akuntabilitas.

C. Pendekatan Marketing Sektor Publik

1. Identifikasi Permasalahan

Diagnosa Permasalahan Organisasi:

Untuk mendiagnosa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, dilakukan melalui metode curah pendapat (*brainstorming*), yang dihadiri oleh Stakeholder internal. Hasil dari Diagnosa tersebut adalah :

- a. Tidak tersedia data pertanggungjawaban dana bantuan kepada masyarakat miskin secara komprehensif
- b. Kompetensi SDM aparatur yang belum memadai;
- c. Belum tersedianya aplikasi yang mengakomodir data masyarakat miskin yang mumpuni
- d. Membuka peluang terjadinya pungli dan gratifikasi dalam proses pelayanan; dan tidak terdapat *strong will* dari kepemimpinan sebelumnya.

Mengacu pada hasil diagnose permasalahan tersebut, kemudian dilakukan diskusi secara mendalam (*focus group discussion/FGD*) dengan melibatkan Mentor Stakeholder internal dan stakeholder Eksternal, maka permasalahan yang dianggap paling strategis dan nantinya diharapkan mampu memberikan dampak keberlanjutan dan memberikan manfaat pada organisasi, yaitu Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk menspesifikasikan dari isu strategis tersebut, kemudian dibahas lagi agar isu strategisnya lebih fokus dan mengarah pada Masyarakat Miskin yang tidak terdata di Basis data, maka isu strategis tersebut dipertajam menjadi: Proses pengajuan dana bantuan masyarakat miskin yang terdata di Basis data. Adapun alasan dipilihnya isu strategis tersebut, yaitu:

- a. Saat ini terlalu banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang membutuhkan data masyarakat miskin
- b. Pengaruh Proses peruntukan dana bantuan masyarakat miskin yang terjadi di banyak tempat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi masyarakat;
- c. Banyaknya dana bantuan masyarakat miskin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Komunikasi dengan *Stakeholders*

Selanjutnya, isu strategis yang berdampak luas dan sistemik tersebut kemudian dikomunikasikan kembali dengan *stakeholders* internal yaitu Sekretaris Daerah, Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Staf bagian di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bentuk komunikasi yang dipandang paling tepat, yaitu dengan mengadakan serial pertemuan guna menyusun kesepakatan antar lembaga, yang mana butir-butir kesepakatan tersebut, diantaranya terdiri dari:

- a. Komitmen seluruh Pemangku Kepentingan untuk mengimplementasikan secara aktif mengambil peran dan tanggung jawab dalam upaya mempertanggungjawabkan melaksanakan penyaluran bantuan dana masyarakat miskin melalui Basis data
- b. Meningkatkan transparansi
- c. Menyusun rencana aksi untuk sosialisasi dan penguatan penggunaan data Basis data untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin.

Tabel 7.3 : Identifikasi Permasalahan

No	Identifikasi pihak yang Berkepentingan	Jenis Produk yang di hasilkan
1	Dinas Sosial	Pelatihan tim teknis DTKS dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaku penanggulangan kemiskinan
2	Kepala Desa, Aparatur Desa	Kompetensi Karakter kerja bagi perangkat desa

3. Permasalahan Pokok yang Dihadapi:

Berdasarkan pada hasil diagnosa terhadap Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan didapatkan berbagai indikasi yang terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga ini sebagaimana telah dibahas Bab sebelumnya. Namun, kalau ditarik ke ranah yang lebih besar khususnya untuk melaksanakan good Government yang bebas dan bersih dari pada KKN. Secara

rinci masalah pokok ini kemudian dispesifikasikan pada administrasi data pertanggungjawaban penanganan kemiskinan melalui Basis data secara komprehensif, Kompetensi SDM aparatur yang belum memadai, Belum tersedianya aplikasi yang mengakomodir kegiatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL , Membuka peluang terjadinya pungli dan gratifikasi dalam proses pelayanan; dan Tidak terdapat *strong will* dari kepemimpinan sebelumnya, Dana bantuan kepada masyarakat miskin umumnya diberikan secara berstruktur tergantung data yang tersedia di DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) , namun masih sangat banyak masyarakat miskin yang tidak terdata sepenuhnya di DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) tersebut.

4. Identifikasi Akar Permasalahan:

Mengacu pada hasil diagnosa atau identifikasi masalah yang telah dilakukan di atas, antara lain keterbatasan kemampuan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan maka Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dianggap perlu untuk dilakukan dalam rangka melaksanakan kehendak kebijakan dan proses pengusulan dan pelaksanaan dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan masyarakat miskin di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

D. Rencana Strategi Marketing:

Strategi merupakan cara atau siasat, yang berhubungan dengan setiap upaya pengambilan keputusan dengan memperhitungkan setiap kemungkinan yang diperkirakan dapat terjadi, guna mencapai tujuan yang diharapkan, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang meliputi koordinasi dan sinergi, penetapan indikator keberhasilan, penyusunan rencana aksi dan sasaran, monitoring & evaluasi, serta pelaporan.

Keberhasilan strategi yang digunakan akan direplikasi pada rencana aksi periode selanjutnya, sedangkan beberapa indikator kegagalan akan di evaluasi dan *di-up date* sesuai dengan permasalahannya.

1. Customer

Customer yang harus diberikan pelayanan adalah Dinas Pertanian, BPKAD, KBPP dan PA, Dinas PMPD, Dinas Peumahan dan Pemukiman, Dinas PU dan TR, Diskominfo, Bagian Hukum, BAZNAS, Dinas PMPD, Dinas Koperasi, UKM

dan Perindag, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin dan seluruh elemen pemangku kepentingan.

2. Jenis Produk Proyek Perubahan

Untuk merealisasikan program kegiatan yang dirancang, maka tahapan-tahapan kegiatan tersebut dibagi dalam dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Dari pelaksanaan rancangan program kegiatan tersebut, produk yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut: Strategi, sosialisasi dll.

3. Place

Untuk melaksanakan program kegiatan yang telah dirancang tersebut, dipilih cara atau metode penyampaiannya yang *simple*, efektif dan efisien serta tepat waktu dan guna. Beberapa metode yang masih dianggap cukup relevan, yaitu sosialisasi proses penginputan data kemiskinan melalui DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL .

4. Price

Biaya yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek perubahan ini dibebankan pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Promotion

Agar proyek perubahan yang dirancang ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan manfaat pada kinerja organisasi, maka untuk memberikan pemahaman dilakukan dengan metode atau cara yang berbeda-beda menyesuaikan dengan *stakeholders*.

- a. Bupati/Walikota dilakukan secara informal yaitu menghadap langsung (*door to door*) dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan urgensi dari peraturan yang terkait dengan pemantapan prosedur pengusulan dana bantuan masyarakat miskin.
- b. Camat dan Lurah, dilakukan dengan cara sosialisasi dengan menyampaian Surat Kepala Dinas tentang mekanisme yang harus dipatuhi.

- c. Sedangkan untuk para staff dan tenaga fungsional dilakukan dengan cara *e-learning*. Diharapkan melalui desain *e-learning* dan berisi konten yang menarik.
- d. Selain itu, materi tentang resume peraturan yang terkait dengan Dana bantuan masyarakat miskin melalui DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) .

Adapun Kerangka Pikir Strategi Marketing tersebut di atas, dari aspek segmentasi umur dan pendidikan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:

5. *Stakeholders* yang Mendukung Strategi Marketing:

Berdasarkan hasil diskusi dan pertemuan-pertemuan singkat dengan beberapa *stakeholders* Internal dan stakeholder eksternal semuanya mendukung kegiatan ini. Hal ini terbukti dengan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang berasal lurah dan Camat serta kebijakan Bupati/Walikota serta OPD-OPD pemangku Kepentingan.

Dukungan lain yang sangat terasa adalah dari eksternal, terutama dari BPKAD, Bagian Hukum, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin. Bentuk dukungan yang diharapkan adalah sebagai narasumber sekaligus pengawas pelaksanaan dana bantuan masyarakat miskin dan kesanggupan untuk segera membuat pedoman kinerja agar terhindar dari Kasus-kasus Dana Bantuan Masyarakat Miskin.

E. Rancangan Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Rancangan yang didesain agar proyek perubahan ini berhasil dengan baik, maka dikembangkan pembelajaran organisasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal. *Stakeholders* internal yang dimaksud adalah *stakeholders* yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai dari Bupati, Sekda, OPD-OPD dan staf dilingkungan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berasal dari luar yang berkontribusi secara langsung pengawasi pelaksanaan Dana Bantuan Masyarakat Miskin keberhasilan proyek perubahan yang sedang dirancang.

Stakeholders ini, Untuk memperjelas sumbangsih terhadap organisasi pembelajaran yang terjadi sebagai berikut:

1. *Stakeholders* Internal

a. Bupati, Sekda

Bersama-sama, membuat bahan ajar formal maupun informal yang dapat mendukung pemantapan penanggulangan kemiskinan melalui DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL sesuai kebutuhan masyarakat di masing masing daerah sehingga tepat sasaran

b. Kabag-Kabag dan staf Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pembelajaran yang dapat dipetik dari Strategi Pemetaan dan Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatandan mekanisme prosedur pengusulan sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dan *sharing knowledge* bagaimana mendesain dan melakukan uji coba peningkatan penggunaan penggunaan DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL dalam penanggulangan kemiskinan serta kerjasama berbagai pemangku kepentingan.

2. *Stakeholders* Eksternal

a. BPKAD, Bagian Hukum, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin.

b. Menyusun kebutuhan dan mekanisme Prosedur pengajuan bantuan masyarakat miskin

VIII. Kendala, Resiko

Tabel 8.1 Kendala dan Resiko

No	Kendala Internal	Resiko	keterangan
1	Tim efektif	Tumpang tindihnya pekerjaan antara rutin dengan area perubahan	Semuanya prioritas yg pelaksanaan berbarengan waktu dalam rangka pelayanan
2	Anggota Tim efektif	Pemahaman atas pekerjaan belum optimal	Motivasi rendah
3	Kualitas dan kuantitas SDM masih belum maksimal	Pelaksanaan pekerjaan tidak dimulai dari perencanaan	Hasil pekerjaan belum berdampak positif bagi pengembangan organisasi
No	Kendala Eksternal	Resiko	keterangan
1	Koordinasi dengan stakeholder	Lebih mengutamakan Tupoksi Organisasi	Pelaksanaan tidak optimal
2	Kegiatan Area Perubahan tidak dianggarkan	Tidak masuk pada APBD dan APBD perubahan	Mencari dana talangan pribadi atau melakukan APBD perubahan
3	Pelaksanaan area perubahan hanya 2 bulan	Tenaga, waktu yang terkuras dalam melaksanakan kegiatan semacam target pencapaian	Hasil pekerjaan belum berdampak positif bagi pengembangan organisasi karena masih terkait dengan stakeholder lainnya

IX. MANAJEMEN PERUBAHAN

A. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan dilaksanakan melalui kegiatan jangka pendek (*milestones*) yang telah diusulkan, disetujui dan memperoleh masukan Mentor, *Coach* dan Evaluator, serta disepakati pada saat seminar rancangan proyek perubahan (RPP). Selanjutnya kegiatan dalam tahapan jangka menengah dan jangka Panjang merupakan *milestones* yang menghasilkan *outcomes* dan *impact* dari kegiatan jangka pendek. Berikut ini beberapa catatan Mentor, Evaluator, dan Coach pada saat seminar RPP:

1. **Marthen Selan, SH** selaku Mentor menjelaskan pentingnya proyek perubahan ini, bahwa Gagasan ini sendiri berangkat dari pendekatan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Pemerintah beranggapan bahwasanya masih terdapatnya masalah dalam pengentasan kemiskinan adalah terkait dengan keberadaan data yang buruk serta tidak akurat.
2. **Drs. Riyadi, M.Si** selaku Evaluator sebagaimana saran dari Mentor juga menyarankan agar dalam tahapan jangka pendek ditambahkan Pelatihan bagi Petugas Khusus Verifikasi dan Validasi dan judul proyek perubahan yang awalnya “Grand Desain Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Di Kabupaten Timor Tengah Selatan” berubah menjadi Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan” tanpa mengubah makna dari proyek perubahan itu sendiri.
3. **Dr. Mudasir, M.Si.** sebagai *Coach* mengingatkan bahwa gagasan *milestones* yang telah direncanakan pada tahapan jangka pendek merupakan kegiatan konkret yang dilaksanakan untuk menghasilkan *output*. Dalam tahapan jangka panjang merupakan *outcomes* dari semua kegiatan jangka pendek. Selain itu, peran tim *agile* (bukan lagi tim efektif) perlu dikelola dengan baik melalui penerapan prinsip-prinsip organisasi pembelajar dan organisasi adaptif, agar pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan efektif. Dalam situasi seperti ini, tentu salah satu penyebab yang dapat ditelusuri adalah

keberadaan data yang seringkali dianggap tidak baik. Data yang tersedia tidak mampu untuk memberikan pembenaran bahwa kelompok sosial yang sudah diberikan anggaran adalah kelompok sosial yang sah untuk menerima anggaran tersebut. Disinilah kita menemukan rasionalisasi yang paling mendasar dari keberadaan DTKS.

Pelaksanaan proyek perubahan merupakan pelaksanaan komitmen. Selama dua bulan melaksanakan janji sebagaimana direncanakan dalam RPP. Proyek perubahan pada PKN-2 bukan hanya sekedar “change” namun harus mampu menampilkan “innovation”. Inovasi pada proyek perubahan ini berada pada level adopsi (level kedua di bawah inovasi murni), yaitu mengadopsi kebijakan pemerintah.

B. BUKTI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Bukti Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Berikut adalah bukti-bukti implementasi proyek perubahan:

I. Milestone 1: Perencanaan

Penentuan judul dan gagasan merupakan langkah awal dari pelaksanaan proyek perubahan ini. Diawali dari diskusi internal Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjajaki adanya permasalahan dan hambatan dalam program kegiatan. Setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka muncullah gagasan untuk





menciptakan Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Persetujuan Mentor yang diperlukan sebagai perwujudan dukungan dari Pimpinan untuk proyek ini. Melalui serangkaian diskusi dengan Mentor,

masukan dan arahan, maka proyek perubahan ini telah disetujui. Berdasarkan persetujuan ini, pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk proyek perubahan dapat dimulai. Setelah dilakukan diskusi, coach sepakat gagasan tersebut untuk diangkat dalam proyek perubahan. Selanjutnya, mengonsultasikan gagasan tersebut sekaligus memohon arahan.

Tahap ini juga melingkupi identifikasi dalam menentukan anggota tim yang merupakan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan secara efektif dan agile. Anggota tim berasal dari internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Identifikasi perlu dilakukan guna mengetahui apakah sebelumnya telah terbentuk tim serupa, atau terdapat tim lain yang memiliki potensi untuk berkontribusi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih ketika terbentuk tim baru, sehingga partisipasi sumber daya manusia menjadi lebih efisien.

Sebagaimana terlihat dari namanya, DTKS bukanlah sebuah inisiatif kebijakan sosial yang bersifat langsung untuk mengentaskan kemiskinan. DTKS adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang lebih



umum dimana tujuan utamanya adalah mendukung setiap kebijakan perlindungan sosial yang ada melalui penyediaan data yang baik.

Sebagai hulu dari sistem kebijakan pengentasan kemiskinan, penyediaan data yang buruk tentu akan berdampak terhadap hilir atau capaian dari kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketersediaan data yang baik harus terpenuhi.

II. Milestone 2: *Milestones 2* : Menyiapkan Tim Internal menginput data

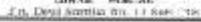
Sesuai namanya yang melibatkan data, pekerjaan ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menginput data kedalam sistem dan memastikan bahwa data yang diinput sudah benar. Data yang dimaksud adalah data yang belum di-input kedalam sistem dan biasanya masih tertulis dalam selebar kertas maupun kumpulan dokumen.

Ketidaktepatan pengisian data akan menyesatkan pengguna data dan berimbas pada proses akuntabilitas institusi. Auditor internal maupun eksternal juga memantau apakah Dinas Sosial telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memonitoring dan mengevaluasi ketepatan unit dalam menginput data yang valid. Project leader sangat selektif dalam mempersiapkan tim internal yang akan menginput data untuk menghindari kesalahan input data, project leader menetapkan pedoman penginputan data dan diperkuat dengan terbitnya Surat Tugas Dinas terkait penginputan data.

Masalahnya kemudian dalam sistem ekonomi yang berlaku, terdapat suatu kelompok sosial yang mana mereka tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Kelompok sosial inilah yang kemudian dinilai sebagai kelompok masyarakat miskin. Semenjak kelompok miskin ini dianggap berada di luar dari sistem ekonomi, lanjut Marlo, maka analisa atas penyebab kemiskinan mereka akan selalu dihubungkan secara individual; mereka adalah kelompok sosial yang secara individual (baik individual secara perorangan maupun keluarga) tidak masuk dalam kategori kelompok masyarakat lain yang mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Gambar 9.2. Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan.

[illegible][illegible][illegible][illegible]



REPLY TO: 1001
 BUREAU OF THE ARMY
 WASHINGTON, D.C. 20315-5001
 (202) 755-1001

PERBENTUAN DAN PENGATURAN PERUMAHAN STRASER: PERISTILAH
DAN PERBENTUAN KOMUNITAS BERKUALITAS LAYANAN PERUMHO LAYANAN
KOMUNITAS DI KABUPATEN BUKIT BARU, TENGAH SELATAN

- BIBLIOTHECA

- Disinfectant 10.00
Total 20.00

TEKNOLOGI LINGKAR SOSIAL
KEMUDAHAN BERKUNJUNG TEKNOLOGI SELATAN

[illegible][illegible]

REKAM DOKUMEN PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN KEMERKATAN DAN PERINDUSTRIAN
KEDIRIAN DE KAMPUSIN TIMOR LELAT MELAYAN
TUMBUH 2000

-

**RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN DI RUANG
RAPAT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.**

1. Yandry E. Karnasi, S.Pi.MW
2. Krisianto Mima, S.Si, MPS, Sp
3. Dm, Muhamad Loka
4. Olan Fdt. Th. Nopo
5. Timotius Selan



DR. SCOT E. DUMLENT, D.Dos. M.S.
Perkins Village, I
No. 9731104 1099003 000



HOCHSCHULE NIEDERRHEIN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Am Stadthafen 10 • 47699 Krefeld • Tel. 02031 307-11

NAME: BRUNNEN

Nr.	Name	Adresse	Telefon
1	E. B. JAHNKE, 17.09.40	B. 40 41	
2	MARTIN VON DER W.	B. 40 42	
3	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 43	
4	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 44	
5	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 45	
6	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 46	
7	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 47	
8	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 48	
9	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 49	
10	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 50	
11	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 51	
12	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 52	
13	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 53	
14	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 54	
15	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 55	
16	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 56	
17	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 57	
18	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 58	
19	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 59	
20	BRUNNEN, C. 1940 10	B. 40 60	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Petugas yang dilatih atau yang mengikuti pelatihan inilah nantinya yang akan melakukan verifikasi dan validasi data dilapangan mencocokkan dengan data yang telah diterima dari pusat. Verifikasi dan validasi dilapangam dilakukan karena beberapa hal seperti ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat dan atau ada

yang telah mampu. Dari perubahan-perubahan tersebut, daerah dalam hal ini Pemkab TTS melakukan verifikasi dan validasi data tersebut maksimal 6 bulan sekali.

Gambar 9.5. Surat Perintah Tugas, Foto Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS SOSIAL
 Jl. Dewi Sartika No.11 Telp/Fax. 0360-21143 SdP, 45511

SURAT PERINTAH TUGAS
 Nomor : D/Sos/11.01.012/SP/2020

1. Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan
 2. Penerima Tugas :

NO	NAMA	JABATAN	DITUGASKAN
1.	Dudy H. Inaso, S.H	PSK Klati Kota SdE	Klati Kota SdE
2.	Tim M. Fous, S.Pd	Guru Pembantu	Klati Kota SdE
3.	Kyrie S. S. Muelputi, SE	Operator	Klati Kota SdE
4.	Bellice Lanki, S.Pd	Operator	Klati Kota SdE
5.	Amanda Norta, S.Pd	TEK. Kec. Amanuban Barat	Kec. Amanuban Barat
6.	Juwah P. Acepon, SH	Operator	Kec. Amanuban Barat
7.	Shay M. Luchenna, S.P	Operator	Kec. Amanuban Barat
8.	Ordi Etau, A.Wd	Operator	Kec. Amanuban Barat
9.	Nunes E. Tamin, S.Pd	Operator	Kec. Amanuban Barat

2. Maksud / Pelaksanaan : Maksud dari Tugas sebagai Pelugas / Pengabdi pada Masyarakat Kota SdE dan Kecamatan Amanuban Barat. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanggal 1 s.d 31 November 2020.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan tidak dibarengi dengan kepentingan lainnya.

Timor Tengah Selatan, 10 Desember 2020
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Timor Tengah Selatan
DR. H. HENDRIK S. SOA, M.Si
 Pemuka Tingkat I
 NIP. 197211241999031001



[illegible]

QUESTION
 1. The following are the components of a business plan:
 a. Executive Summary
 b. Business Description
 c. Market Analysis
 d. Financial Projections
 e. Management Team
 f. Risk Factors
 g. Appendix

ANSWER
 All of the above are components of a business plan.

QUESTION
 2. The primary purpose of a business plan is to:

ANSWER
 a. Attract investors
 b. Guide the business owner
 c. Both a and b
 d. None of the above

ANSWER
 c. Both a and b

QUESTION
 3. The following are the key elements of a business plan:
 a. Executive Summary
 b. Business Description
 c. Market Analysis
 d. Financial Projections
 e. Management Team
 f. Risk Factors
 g. Appendix

ANSWER
 All of the above are key elements of a business plan.

QUESTION
 4. The primary purpose of a business plan is to:

ANSWER
 a. Attract investors
 b. Guide the business owner
 c. Both a and b
 d. None of the above

ANSWER
 c. Both a and b

QUESTION
 5. The following are the key elements of a business plan:
 a. Executive Summary
 b. Business Description
 c. Market Analysis
 d. Financial Projections
 e. Management Team
 f. Risk Factors
 g. Appendix

ANSWER
 All of the above are key elements of a business plan.

QUESTION
 6. The primary purpose of a business plan is to:

ANSWER
 a. Attract investors
 b. Guide the business owner
 c. Both a and b
 d. None of the above

ANSWER
 c. Both a and b

QUESTION
 7. The following are the key elements of a business plan:
 a. Executive Summary
 b. Business Description
 c. Market Analysis
 d. Financial Projections
 e. Management Team
 f. Risk Factors
 g. Appendix

ANSWER
 All of the above are key elements of a business plan.

QUESTION
 8. The primary purpose of a business plan is to:

ANSWER
 a. Attract investors
 b. Guide the business owner
 c. Both a and b
 d. None of the above

ANSWER
 c. Both a and b

QUESTION
 9. The following are the key elements of a business plan:
 a. Executive Summary
 b. Business Description
 c. Market Analysis
 d. Financial Projections
 e. Management Team
 f. Risk Factors
 g. Appendix

ANSWER
 All of the above are key elements of a business plan.

QUESTION
 10. The primary purpose of a business plan is to:

ANSWER
 a. Attract investors
 b. Guide the business owner
 c. Both a and b
 d. None of the above

ANSWER
 c. Both a and b

1. 1980-1981
 2. 1981-1982
 3. 1982-1983
 4. 1983-1984
 5. 1984-1985
 6. 1985-1986
 7. 1986-1987
 8. 1987-1988
 9. 1988-1989
 10. 1989-1990
 11. 1990-1991
 12. 1991-1992
 13. 1992-1993
 14. 1993-1994
 15. 1994-1995
 16. 1995-1996
 17. 1996-1997
 18. 1997-1998
 19. 1998-1999
 20. 1999-2000
 21. 2000-2001
 22. 2001-2002
 23. 2002-2003
 24. 2003-2004
 25. 2004-2005
 26. 2005-2006
 27. 2006-2007
 28. 2007-2008
 29. 2008-2009
 30. 2009-2010
 31. 2010-2011
 32. 2011-2012
 33. 2012-2013
 34. 2013-2014
 35. 2014-2015
 36. 2015-2016
 37. 2016-2017
 38. 2017-2018
 39. 2018-2019
 40. 2019-2020
 41. 2020-2021
 42. 2021-2022
 43. 2022-2023
 44. 2023-2024
 45. 2024-2025
 46. 2025-2026
 47. 2026-2027
 48. 2027-2028
 49. 2028-2029
 50. 2029-2030
 51. 2030-2031
 52. 2031-2032
 53. 2032-2033
 54. 2033-2034
 55. 2034-2035
 56. 2035-2036
 57. 2036-2037
 58. 2037-2038
 59. 2038-2039
 60. 2039-2040
 61. 2040-2041
 62. 2041-2042
 63. 2042-2043
 64. 2043-2044
 65. 2044-2045
 66. 2045-2046
 67. 2046-2047
 68. 2047-2048
 69. 2048-2049
 70. 2049-2050
 71. 2050-2051
 72. 2051-2052
 73. 2052-2053
 74. 2053-2054
 75. 2054-2055
 76. 2055-2056
 77. 2056-2057
 78. 2057-2058
 79. 2058-2059
 80. 2059-2060
 81. 2060-2061
 82. 2061-2062
 83. 2062-2063
 84. 2063-2064
 85. 2064-2065
 86. 2065-2066
 87. 2066-2067
 88. 2067-2068
 89. 2068-2069
 90. 2069-2070
 91. 2070-2071
 92. 2071-2072
 93. 2072-2073
 94. 2073-2074
 95. 2074-2075
 96. 2075-2076
 97. 2076-2077
 98. 2077-2078
 99. 2078-2079
 100. 2079-2080
 101. 2080-2081
 102. 2081-2082
 103. 2082-2083
 104. 2083-2084
 105. 2084-2085
 106. 2085-2086
 107. 2086-2087
 108. 2087-2088
 109. 2088-2089
 110. 2089-2090
 111. 2090-2091
 112. 2091-2092
 113. 2092-2093
 114. 2093-2094
 115. 2094-2095
 116. 2095-2096
 117. 2096-2097
 118. 2097-2098
 119. 2098-2099
 120. 2099-2100
 121. 2100-2101
 122. 2101-2102
 123. 2102-2103
 124. 2103-2104
 125. 2104-2105
 126. 2105-2106
 127. 2106-2107
 128. 2107-2108
 129. 2108-2109
 130. 2109-2110
 131. 2110-2111
 132. 2111-2112
 133. 2112-2113
 134. 2113-2114
 135. 2114-2115
 136. 2115-2116
 137. 2116-2117
 138. 2117-2118
 139. 2118-2119
 140. 2119-2120
 141. 2120-2121
 142. 2121-2122
 143. 2122-2123
 144. 2123-2124
 145. 2124-2125
 146. 2125-2126
 147. 2126-2127
 148. 2127-2128
 149. 2128-2129
 150. 2129-2130
 151. 2130-2131
 152. 2131-2132
 153. 2132-2133
 154. 2133-2134
 155. 2134-2135
 156. 2135-2136
 157. 2136-2137
 158. 2137-2138
 159. 2138-2139
 160. 2139-2140
 161. 2140-2141
 162. 2141-2142
 163. 2142-2143
 164. 2143-2144
 165. 2144-2145
 166. 2145-2146
 167. 2146-2147
 168. 2147-2148
 169. 2148-2149
 170. 2149-2150
 171. 2150-2151
 172. 2151-2152
 173. 2152-2153
 174. 2153-2154
 175. 2154-2155
 176. 2155-2156
 177. 2156-2157
 178. 2157-2158
 179. 2158-2159
 180. 2159-2160
 181. 2160-2161
 182. 2161-2162
 183. 2162-2163
 184. 2163-2164
 185. 2164-2165
 186. 2165-2166
 187. 2166-2167
 188. 2167-2168
 189. 2168-2169
 190. 2169-2170
 191. 2170-2171
 192. 2171-2172
 193. 2172-2173
 194. 2173-2174
 195. 2174-2175
 196. 2175-2176
 197. 2176-2177
 198. 2177-2178
 199. 2178-2179
 200. 2179-2180
 201. 2180-2181
 202. 2181-2182
 203. 2182-2183
 204. 2183-2184
 205. 2184-2185
 206. 2185-2186
 207. 2186-2187
 208. 2187-2188
 209. 2188-2189
 210. 2189-2190
 211. 2190-2191
 212. 2191-2192
 213. 2192-2193
 214. 2193-2194
 215. 2194-2195
 216. 2195-2196
 217. 2196-2197
 218. 2197-2198
 219. 2198-2199
 220. 2199-2200
 221. 2200-2201





VI. Milestone 6:

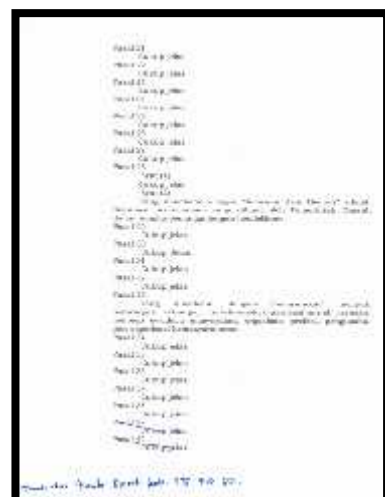
- **Proses Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan.**
- **Proses Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan.**

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah Timor Tengah Selatan dan adanya umpan balik (feedback) terhadap strategi jangka panjang yang dirumuskan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka daerah-daerah, khususnya yang ada di NTT, memberikan berbagai masukan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan. Masukan-masukan ini menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran, seperti aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, ketersediaan sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi, serta monev. Selain itu, juga ada masukan mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga donor, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dorongan atau support untuk menyusun perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Project leader bersama dengan tim efektif bahu membahu dalam proses pembahasan pembuatan Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan hingga proses Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat terealisasi sepenuhnya.

Gambar 9.6. Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan, Dokumen Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan, Dokumentasi





PEMBAHASAN PERBUP PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

VII. Milestone 7: Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan kepada stakeholder eksternal (seluruh Pimpinan OPD, Kecamatan Kota SoE dan Kecamatan Amanuban Barat).

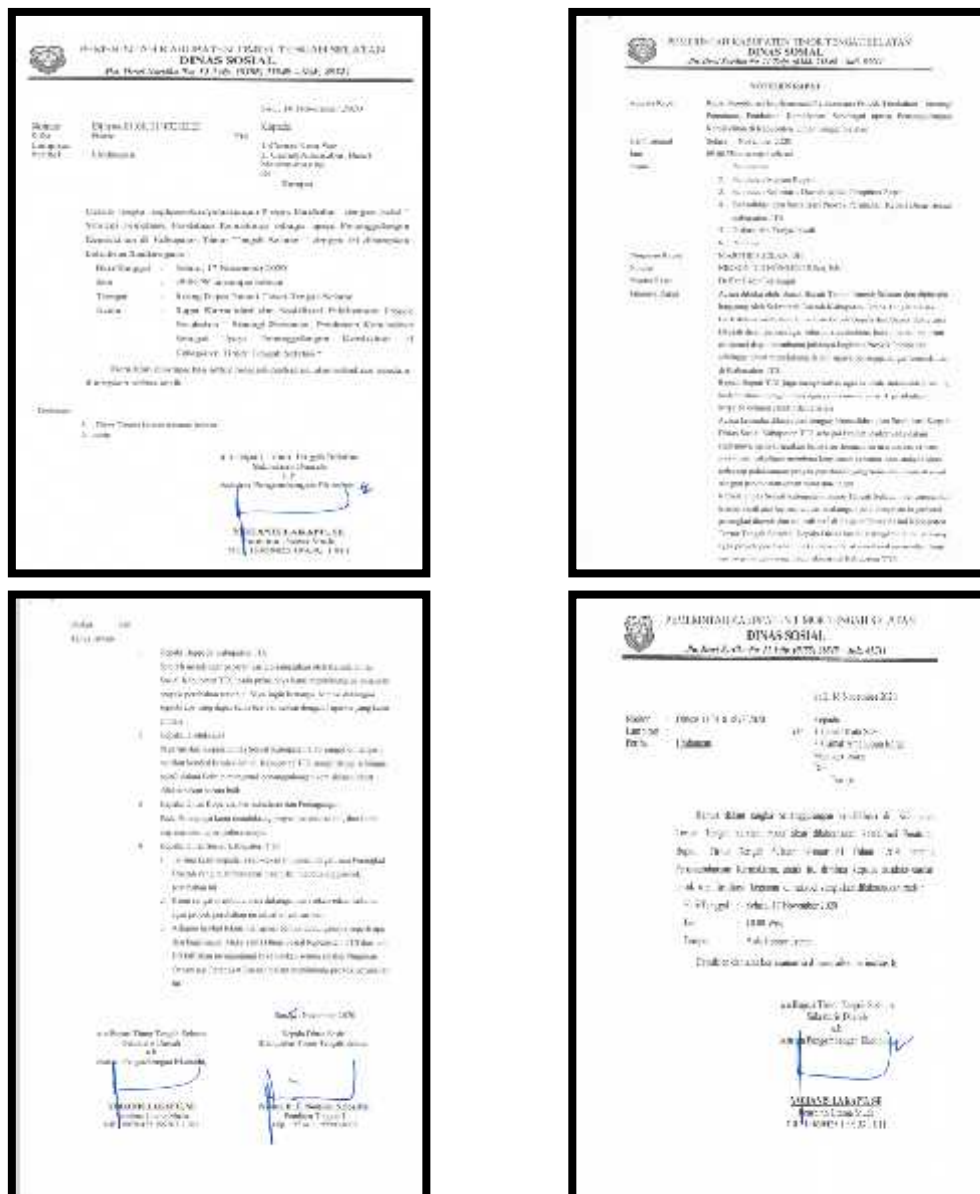
Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 telah diadakan acara Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan kepada stakeholder eksternal yang bertempat di Kecamatan Kota SoE dan Kecamatan Amanuban Barat.

Dalam sambutannya project leader menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten TTS, perlu dilakukan koordinasi sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat Desa/Kelurahan. Kedekatan pengentasan kemiskinan tersasar bukanlah sesuatu yang sifatnya alamiah. Pemerintah dapat menyatakan bahwa suatu kelompok warga negara tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hanya karena kelompok tersebut tidak masuk dalam kategori data yang diakui pemerintah. Pendekatan ini tentu sesuai dengan logika negara yang menekankan pada kontribusi minimal terhadap kebutuhan sosial masyarakatnya.

Memperlemah Kuasa serta Posisi Tawar Kelompok Miskin. Pendekatan pengentasan yang tersasar membuat kalangan miskin yang mendapatkan alokasi negara menjadi lemah posisi tawarnya. Hal ini dikarenakan kalangan miskin akan melihat alokasi bukan sebagai hak tapi sebagai “bantuan,” bantuan untuk dapat menikmati (secara sementara dan terbatas) sistem ekonomi yang ada. Hal ini tentu sangat berbahaya karena pada akhirnya kelompok miskin menjadi kehilangan independensinya yang dengannya tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas kewarganegaraannya yakni menjadi pengawas kritis terhadap kinerja pemerintahan yang ada.

Dengan kompleksitas masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, project leader pun menginisiasi inovasi dalam proyek perubahannya dengan menyediakan paying hukum, yaitu Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Gambar 9.7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Undangan, Notulen Rapat, Dokumentasi.





**SOSIALISASI PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 61
TAHUN 2020 TENTANG PENGANGGULANGAN DI KECAMATAN AMANUBAN
BARAT.**



**SOSIALISASI PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 61
TAHUN 2020 TENTANG PENGANGGULANGAN DI KECAMATAN KOTA SOE.**



X. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Pelaksanaan implemntasi proyek perubahan Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih fluktuatif serta didominasi oleh program dan anggaran dari pemerintah. Proyek perubahan senada belum dimanfaatkan sehingga pengimplementasiannya belum optimal.

Dinas Sosial Kab. TTS mengidentifikasi beberapa fenomena yang muncul berdasarkan hasil analisis di lapangan, hasil diagnosa terhadap Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan didapatkan berbagai indikasi yang terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga ini sebagaimana telah dibahas Bab sebelumnya. Namun, kalau ditarik ke ranah yang lebih besar khususnya untuk melaksanakan good Government yang bebas dan bersih dari pada KKN. Secara rinci masalah pokok ini kemudian dispesifikasikan pada administrasi data pertanggungjawaban penanganan kemiskinan melalui DTKS secara komprehensif, Kompetensi SDM aparatur yang belum memadai, Belum tersedianya aplikasi yang mengakomodir kegiatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Basis data terpadu, Membuka peluang terjadinya pungli dan gratifikasi dalam proses pelayanan; dan Tidak terdapat *strong will* dari kepemimpinan sebelumnya, Dana bantuan kepada masyarakat miskin umumnya diberikan secara berstruktur tergantung data yang tersedia di DTKS, namun masih sangat banyak masyarakat miskin yang tidak terdata sepenuhnya di DTKS tersebut.

Hal ini ditempuh dengan langkah-langkah kebijakan terstruktur dan sistematis melalui terobosan-terobosan strategis keberpihakan kebijakan. Strategi merupakan cara atau siasat, yang berhubungan dengan setiap upaya pengambilan keputusan dengan memperhitungkan setiap kemungkinan yang diperkirakan dapat terjadi, guna mencapai tujuan yang diharapkan, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang meliputi koordinasi dan sinergi, penetapan indikator keberhasilan, penyusunan rencana aksi dan sasaran, monitoring & evaluasi, serta pelaporan. Keberhasilan strategi yang digunakan akan direplikasi pada rencana aksi periode selanjutnya, sedangkan beberapa indikator kegagalan akan di evaluasi dan di-*up date* sesuai dengan permasalahannya.

- **Customer**

Customer yang harus diberikan pelayanan adalah Dinas Pertanian, BPKAD, KBPP dan PA, Dinas PMPD, Dinas Peumahan dan Pemukiman, Dinas PU dan TR, Diskominfo, Bagian Hukum, BAZNAS, Dinas PMPD, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin dan seluruh elemen pemangku kepentingan. Setiap instansi akan berupaya menampilkan kualitas pelayanan prima. Pelayanan prima (*service excellence*) atau memberikan pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan pegawai agar dapat menumbuhkan dedikasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pihak pemangku kepentingan sehingga diharapkan mampu mempertahankan loyalitas atau kepercayaan.

- **Jenis Produk Proyek Perubahan**

Project leader telah merealisasikan 7 (tujuh) program kegiatan yang dirancang, maka tahapan-tahapan kegiatan tersebut dibagi dalam dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan menyelesaikan seluruh pentahapan, project leader dan tim efektif pun dalam menarik kesimpulan bahwa ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah lemah, itu berarti bahwa perekonomian berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi adengan munculnya ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susah nya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal.

Dengan adanya proyek perubahan ini berdasarkan hasil diskusi dan pertemuan-pertemuan singkat dengan beberapa *stakeholders* Internal dan stakeholder eksternal semuanya mendukung kegiatan ini. Hal ini terbukti dengan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang berasal lurah dan Camat serta kebijakan Bupati/Walikota serta OPD-OPD pemangku Kepentingan.

Dukungan lain yang sangat terasa adalah dari eksternal, terutama dari Dinas Pertanian, BPKAD, KBPP dan PA, Dinas PMPD, Dinas Peumahan dan Pemukiman,

Dinas PU dan TR, Diskominfo, Bagian Hukum, BAZNAS, Dinas PMPD, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin. Bentuk dukungan yang diharapkan adalah sebagai narasumber sekaligus pengawas pelaksanaan dana bantuan masyarakat miskin dan kesanggupan untuk segera membuat pedoman kinerja agar terhindar dari Kasus-kasus Dana Bantuan Masyarakat Miskin.

- **Place**

Untuk melaksanakan program kegiatan yang telah dirancang, yaitu Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- **Price**

Biaya yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek perubahan ini dibebankan pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- **Promotion**

Proyek perubahan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan manfaat pada kinerja organisasi, maka untuk memberikan pemahaman dilakukan dengan metode atau cara yang berbeda-beda menyesuaikan dengan *stakeholders*.

- a. Bupati menghadap langsung (*door to door*) dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan urgensi dari peraturan yang terkait dengan pemantapan prosedur pengusulan dana bantuan masyarakat miskin.
 - b. Camat dan Lurah, dilakukan dengan cara sosialisasi dengan menyampaian Surat Kepala Dinas tentang mekanisme yang harus dipatuhi.
 - c. Sedangkan untuk para staff dan tenaga fungsional dilakukan dengan cara *e-learning*. Diharapkan melalui desain *e-learning* dan berisi konten yang menarik.
- Selain itu, materi tentang resume peraturan yang terkait dengan Dana bantuan masyarakat miskin melalui DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS).

- **Stakeholders yang Mendukung Strategi Marketing:**

Berdasarkan hasil diskusi dan pertemuan-pertemuan singkat dengan beberapa *stakeholders* Internal dan stakeholder eksternal semuanya mendukung kegiatan ini. Hal ini terbukti dengan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang berasal lurah dan Camat serta kebijakan Bupati/Walikota serta OPD-OPD pemangku Kepentingan.

Dukungan lain yang sangat terasa adalah dari eksternal, terutama dari BPKAD, Bagian Hukum, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin. Bentuk dukungan yang diharapkan adalah sebagai narasumber sekaligus pengawas pelaksanaan dana bantuan masyarakat miskin dan kesanggupan untuk segera membuat pedoman kinerja agar terhindar dari Kasus-kasus Dana Bantuan Masyarakat Miskin.

1. Stakeholders Internal

a. Bupati, Sekda

Bersama-sama, membuat bahan ajar formal maupun informal yang dapat mendukung pemantapan penanggulangan kemiskinan melalui DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL sesuai kebutuhan masyarakat di masing masing daerah sehingga tepat sasaran

b. Kabag-Kabag dan staf Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pembelajaran yang dapat dipetik dari Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mekanisme prosedur pengusulan sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dan *sharing knowledge* bagaimana mendesain dan melakukan uji coba peningkatan penggunaan penggunaan DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL dalam penanggulangan kemiskinan serta kerjasama berbagai pemangku kepentingan.

2. Stakeholders Eksternal

- a. BPKAD, Bagian Hukum, Bappeda Litbang, Dinkes, Disdukcapil, Camat, Lurah, Kepala Desa, BPJS dan masyarakat miskin.
- b. Menyusun kebutuhan dan mekanisme Prosedur pengajuan bantuan masyarakat miskin.

Tabel 9.1
Desiminasi Output Proyek Perubahan

NO	TAHAPAN UTAMA	KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	OUTPUT
1.	Perencanaan	✓ Menyiapkan tim melaksanakan proyek perubahan. ✓ Menyusun rencana detail proyek perubahan jangka pendek.	1 kali 100%	✓ Surat Keputusan (SK) Tim ✓ Dokumen rencana kegiatan
2.	Menyiapkan Tim Internal menginput data	✓ Menetapkan pedoman penginputan data ✓ Surat Tugas Dinas terkait penginputan data	1 kali 100%	✓ Dokumen pedoman penginputan data ✓ Surat dinas ✓ Photo ✓ Tanda terima surat ✓ Lembar disposisi
3.	Forum Group Discussion terkait Penanganan Kemiskinan Berbasis Data	✓ Menyelenggarakan <i>focus group discussion</i> (FGD) dengan perwakilan stakeholder yang terkait. ✓ Melaksanakan FGD dengan tim ahli instansi terkait untuk menyusun pedoman basis data	2 kali 100%	✓ Undangan FGD ✓ Photo kegiatan ✓ Hasil kajian ✓ absensi
4.	Menginventari	✓ Mempersiapkan	2 kali	✓ Inventarisasi tools

	si data yang telah tervalidasi penerima bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	inventarisir data valid penerima bantuan sosial	100 %	✓ Undangan rapat musyawarah ✓ Photo kegiatan
5.	Melaksanakan Pelatihan bagi Petugas Khusus Verifikasi dan Validasi	✓ Pelatihan dilaksanakan pada aula Dinas Sosial.	1 Kali 100%	✓ Undangan. ✓ Daftar hadir. ✓ Dokumentasi
6.	Proses Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan kemiskinan. Proses Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan kemiskinan.	✓ Pengajuan Dokumen Perbub Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan kemiskinan. ✓ Dokumen Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan kemiskinan telah dittd.		✓ Draft Peraturan Bupati tentang Penanggulangan kemiskinan. ✓ Dokumen Peraturan Bupati tentang Penanggulangan kemiskinan ✓ Dokumentasi
	Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan kemiskinan kepada	Terwujudnya pemahaman bersama tentang upaya penanggulangan kemiskinan.		✓ Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penanggulangan kemiskinan. ✓ Undangan.

	stakeholder eksternal (seluruh Pimpinan OPD, Kecamatan Kota SoE dan Kecamatan Amanuban Barat).			✓ Notulen Rapat. ✓ Dokumentasi.
--	--	--	--	---

XI. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Pada saat pembekalan sebelum *off-campus* diingatkan bahwa sebuah proyek perubahan merupakan wahana pembelajaran kepemimpinan dengan bimbingan *coach* dan mentor, dan kolaborasi mengarahkan *stakeholders* internal (tim *agile*) dan kerjasama dengan *stakeholders* eksternal organisasi. Menurut Peter Senge (Marpaung, 2019), organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang para pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

Upaya yang dilakukan oleh *project leader* dalam mengembangkan pembelajaran organisasi guna memberdayakan stakeholder internal dan eksternal dalam pelaksanaan Proyek Perubahan Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan melalui :

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan terhadap *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal untuk membahas tahapan yang perlu dilakukan dalam mensukseskan Proyek Perubahan Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Mengedukasi serta melibatkan secara langsung semua Pejabat terkait dalam Proyek Perubahan Strategi Pemetaan, Pendataan Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pengembangan kapasitas melalui pembelajaran kepemimpinan dengan tahapan: pengembangan-penyebaran -penerapan pengetahuan baru. Selanjutnya David Garvin (Marpaung, 2019) menambahkan bahwa pemimpin dan pegawai dalam organisasi pembelajar akan secara sengaja mengubah perilakunya untuk merefleksikan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Dinas Sosial Kab. TTS dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi.

A. Pengembangan pengetahuan baru (*Knowledge Development*): menjual gagasan

Gagasan inovasi yang ditawarkan lahir melalui adopsi kebijakan pemerintah yang telah ada dalam mengatasi mismatch pelayanan dengan kebutuhan pasar kerja. Ide ini membawa ke ruang perubahan.

Terlaksananya proses di atas harus dibarengi dengan perubahan pola pikir (paradigma) sehingga keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam proses penanggulangan kemiskinan bukan semata mata karena proyek atau bahkan untuk mengejar Bantuan Langsung Masyarakat, akan tetapi merupakan keterlibatan yang didasari oleh kesadaran kritis.

Berdasarkan Proyek perubahan ini, Persentase penduduk miskin Provinsi NTT pada Maret 2020 sebesar 20,90 persen meningkat 0,28 persen poin terhadap September 2019 dan menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 1.153,76 ribu orang meningkat 24,3 ribu orang terhadap September 2019 dan meningkat 7,44 ribu orang terhadap Maret 2019.

Merumuskan dan menentukan akar masalah serta menemukan gagasan yang diperlukan sebagai solusi, dilakukan melalui diskusi dengan *stakeholders* internal dan mengajak berpikir secara sistemik. Diskusi secara terbuka dan bebas dalam menemukan pola berpikir baru, saling melontarkan ide dan gagasan inovatif. Melalui dialog strategis setiap staf diberi ruang kebebasan menemukan pola baru, dan menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi, melakukan refleksi dan menemukan solusi bagi perbaikan organisasi masa depan.

Pada kesempatan berikutnya, diskusi sudah berkembang ke arah mengidentifikasi akar masalah yang menjadi penyebab dan implikasinya. Atas dasar beberapa penyebab masalah, diidentifikasi penyebab utama adalah lemahnya peran pengelola di instansi perencanaan pembangunan. Selanjutnya semua *stakeholders* internal menyepakati bahwa harus ada upaya penguatan peran. Perlu disusun disain pelatihan baru dan pola pendaftaran satu pintu.

B. Penyebaran pengetahuan baru (*Knowledge Sharing*)

Gagasan yang telah disepakati pada tahap sebelumnya merupakan pengetahuan baru bagi organisasi. Gagasan tersebut merupakan visi perubahan yang perlu didiseminasikan dan ditransformasikan kepada seluruh *stakeholders* internal. Menurut Polanyi (Marpaung, 2019) pada tahap ini fungsi dan peran pemimpin adalah: (a) *Designer*, sebagai perancang proyek perubahan yang merealisasikan terwujudnya visi; (b) *Teacher*, sebagai konseptor, motivator, pembentuk tim *agile*, dan fasilitator transformasi; dan (c) *Steward*, sebagai perumus visi, misi dan strategi, optimalisasi kompetensi tersedia, mengarahkan organisasi, menggalang aliansi, sinergi, dukungan dan kemitraan, serta menyelesaikan masalah dan mengatasi hambatan.

C. Penerapan pengetahuan baru (*Knowledge Application*)

Kepala Dinas Sosial Kab. TTS sebagai *designer* melakukan diskusi untuk menyamakan pemahaman terhadap gagasan, mengumpulkan data dan fakta, menganalisis lingkungan strategis, dan merumuskan strategi pelaksanaan proyek perubahan. Strategi dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan (RPP), meliputi: kegiatan *milestones*, keluaran, target waktu dan pelaksana. RPP dibagi menurut tahapan dan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Fungsi sebagai *Steward* dilaksanakan Kepala Dinas Sosial Kab. TTS dalam rangka menjadi pelayan dan pengawal transformasi organisasi agar sesuai dengan RPP. Melalui diskusi, konsultasi dan instruksi kepada para Kabid, Kepala Dinas Sosial Kab. TTS melakukan pembagian tugas menurut tugas dan fungsi bidang masing-masing, dengan mempertimbangkan ketersediaan staf dan kompetensi yang tersedia. Kepala Dinas Sosial Kab. TTS menginstruksikan kepada Kabid dan staf untuk menggalang aliansi, dukungan dan kemitraan dengan *stakeholders* eksternal. Kepada staf yang memiliki keahlian infografis, diberikan tugas untuk membuat bahan promosi melalui berbagai media sosial dan video. Sebagai *steward*, Ka.BPSDMD Prov. Sumsel mengendalikan dan memantau setiap pelaksanaan strategi. Sehingga terbuka ruang bagi seluruh staf untuk konsultasi dan evaluasi apabila terjadi kendala dan hambatan pelaksanaan RPP.

Fungsi Kepala Dinas Sosial Kab. TTS sebagai *Teacher* diperlukan ketika membentuk tim *agile* untuk meyakinkan gagasan transformasi organisasi,

menggalang dukungan dan *taking-ownership* dan mengundang partisipasi aktif seluruh *stakeholders* internal. Keterlibatan aktif staf terlihat pada saat penyiapan: dokumen kerangka acuan (TOR, undangan, narasumber, poster, foto dan video testimoni, dan dokumen perjalanan, akomodasi, dan dukungan pembiayaan.

Pengetahuan yang membukakan cakrawala baru bagi pimpinan dan staf Dinas Sosial Kab. TTS meliputi: (a) pelatihan yang efektif adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pengguna; (b) pengelola kegiatan mempunyai peran penting sebagai penentu arah dan perumus kebijakan pengembangan SDM di instansi masing-masing; (c) mengubah *mind-set* (pola pikir dan pola kerja) individu dan organisasi memerlukan waktu dan kerja keras. Oleh karena itu, diperlukan juga konsistensi dan fleksibilitas pelaksana, dengan tetap mengarah kepada pencapaian visi dan misi perubahan organisasi.

Mengingat sulitnya mengubah pola pikir seseorang, maka kami instruksikan kepada setiap anggota tim agile untuk melaksanakan strategi pemasaran kepada *stakeholders* eksternal melalui berbagai media yang paling memungkinkan. Maka kemudian muncul usulan promosi melalui media dan forum-forum sosialisasi dan advokasi ke berbagai stakeholder.

Pada tahap ini Kepala Dinas Sosial Kab. TTS melakukan persuasi, advokasi dan instruksi yang jelas kepada pejabat struktural dan staf di Dinas Sosial Kab. TTS untuk memahami gagasan utama dan menerapkannya ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Penerapan pengetahuan baru dilakukan dengan cara mengubah perilaku pegawai yang merefleksikan telah dipahaminya pengetahuan dan pemahaman baru tersebut. Perubahan perilaku pegawai antara lain:

- ✓ **Mewujudkan Visi Perubahan.** Berdasarkan rambu-rambu dan arahan yang jelas dari Kepala Dinas Sosial Kab. TTS, pimpinan dan staf Dinas Sosial Kab. TTS memiliki pemahaman sama terhadap visi dan tujuan perubahan, kegiatan *milestones* dan prioritas yang harus dilakukan, termasuk antisipasi potensi kendala dan hambatan pelaksanaan PP.
- ✓ **Ruang Dialog.** Melalui pelaksanaan PP ini pimpinan dan staf Dinas Sosial Kab. TTS diberi kesempatan untuk memiliki kebebasan, pola pikir baru, kreatifitas, dan kesempatan mengembangkan kapasitas individu melalui proses belajar secara berkelanjutan. Proses bersama dalam menemukan masalah dan solusi,

menyusun TOR, mendisain gagasan menjadi program pelatihan, sampai melaksanakan strategi pemasaran.

- ✓ ***Evidence Based Policy dan Decision Making***. Pegawai diajak untuk memahami proses perumusan kebijakan Kepala Dinas Sosial Kab. TTS beserta strategi pelaksanaannya. Tertib untuk mencatat, mengumpulkan bukti berupa foto, video, notulensi, data dan fakta, yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Setiap staf diinstruksikan untuk melakukan hal ini pada setiap pelaksanaan tahapan jangka pendek, menengah dan panjang.

XII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proyek Perubahan ini telah menghasilkan strategi dalam pemetaan, pendataan kemiskinan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Project leader bersama tim efektif selalu berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder baik internal dan eksternal guna mensukseskan proyek perubahan.
3. Terdapat korelasi antara tingkat kemiskinan dengan karakteristik rumah tangga miskin. Di Kecamatan Kota SoE terdapat korelasi dengan tingkat signifikansi yang kuat antara kemiskinan dengan pendapatan, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah kepala keluarga yang tidak tamat SD, namun terdapat tingkat signifikansi yang lemah antara kemiskinan dengan usaha sampingan.
4. Sedangkan di dan Kecamatan Amanuban Barat terdapat korelasi dengan tingkat signifikansi yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan dan usaha sampingan, namun terdapat tingkat signifikansi yang lemah antara tingkat kemiskinan dengan luas lahan, jumlah tanggungan dan jumlah kepala keluarga yang tidak tamat SD.
5. Salah satu isu yang mendesak dan memerlukan data yang akurat dan terpadu adalah masalah kemiskinan. Isu kemiskinan tidak hanya terkait upaya memperoleh perkiraan tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan, tetapi juga terkait data jumlah penduduk/rumah tangga dengan pemeringkatan kesejahteraan sebagai rujukan penetapan sasaran program.

B. REKOMENDASI

1. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin di Kabupaten TTS dengan membuat program pengembangan ekonomi dengan sector pertanian sebagai komoditas unggulan dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat miskin melalui program penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten TTS

dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga dapat bebas dari belenggu kemiskinan.

3. Kualitas infrastruktur jalan, alat pertanian dan sarana pasar yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten TTS perlu di tingkatkan.
4. Masalah yang muncul selalu soal data, mulai dari akurasi; keterpaduan; kepemilikan; sehingga dibutuhkan focus untuk membangun aplikasi dan mendapatkan data di lembaga-lembaga pemerintah.
5. Berbekal konsep integrasi data yang kuat, mulai dari tujuan, langkah hingga tahapan, DTKS wajib dioptimalkan lagi oleh Pemkab TTS sebagai alat olah data dan olah informasi. Prinsip dalam pengumpulan, integrasi, pengelolaan hingga pemanfaatan baik nonteknis maupun teknis aplikasi yang ada di tiga regulasi satu data yang dijelaskan di awal, relatif telah dipenuhi dalam siklus proses pembaruan data di Kab. TTS.
6. Pengentasan kemiskinan di Kab. TTS tidak selamanya berdimensi ekonomi, dalam proyek peprubahan telah dibahas melalui pendekatan peran, fungsional struktural, kapabilitas sistem politik dan partisipatif. Dimana pokok persoalan adalah bagaimana stakeholder menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Harus melibatkan pihak luar seperti swasta dan masyarakat yang merupakan tiga elemen kunci dalam program pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 2010, Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Yogyakarta.

Creswell, John W, 2009, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung

Kurniawan, Yudiyanto T, 2015a, Strategi Optimalisasi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk keluarga miskin di Puskesmas Kedamean, Malang

Kurniawan, Yudiyanto T, 2015b, Dampak Program Jalinkesra Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Sumberdaya Manusia Pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Studi kasus di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Surabaya.

Kurniawan, Yudiyanto T, 2017, Faktor-faktor dan pola hubungannya yang mempengaruhi pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN) oleh keluarga miskin, Studi kasus di Puskesmas wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Surabaya.

Muyasara, Siti, 2010, Analisa SWOT terhadap Produk Asuransi Unit LINK, Studi pada PT.Asuransi Takaful Keluarga, Jakarta.

Moleong, J.L. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rangkuti, Freddy, 2002, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

LAMPIRAN EVIDENCE